



# PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)



Tahun

# 2025



## DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/4038/050/VII/2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG.

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 dan Rencana kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2025, maka Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/4038/VII/2025 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);

16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60).
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 108);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Acara Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
24. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025;

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA :** Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 28 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG



MARGARTHA MITA DEWI SOPA

TEMBUSAN Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bappeda Kota Semarang;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/4038/VII/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS  
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

**RENCANA KERJA ( RENJA ) PERUBAHAN  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini dapat tersusun.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025, untuk menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta indikatornya serta program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif. Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.

Kami menyadari bahwa Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini belum sempurna, maka dari itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Selanjutnya diharapkan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini dapat diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, 28 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG

f. MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iv</b>
<b>I. BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>I-1</b>
I.1 LATAR BELAKANG .....	I-1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	I-3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	I-6
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN .....	I-7
<b>II. BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2024</b>	<b>II-1</b>
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG .....	II-1
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG .....	II-17
II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG .....	II-21
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD .....	II-24
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT ..	II-32
<b>III. BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG</b>	<b>III-1</b>
III.1 TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	III-1
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG .....	III-5
<b>IV. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG</b>	<b>IV-1</b>
IV.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN .....	IV-1
<b>V. BAB V PENUTUP</b>	<b>V-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang .....	II-2
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Triwulan II Tahun 2024 .....	II-12
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 .....	II-17
Tabel 2. 4 Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024.....	II-19
Tabel 2. 5 Realisasi Indikator Kinerja Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ...	II-19
Tabel 2. 6 Anggaran Responsif Gender Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Menengah Kota Semarang Tahun 2025 .....	II-19
Tabel 2. 7 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang .....	II-25
Tabel 2. 8 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.....	II-32
Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 .....	III-6
Tabel 4. 1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang .....	IV-3

## DAFTAR GAMBAR

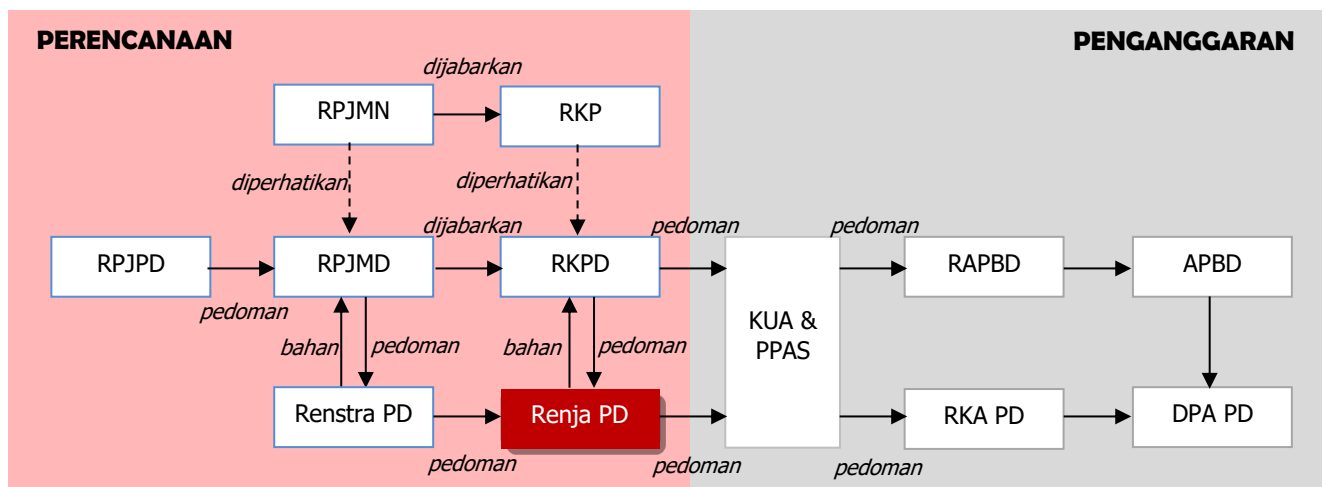
Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD..... I-1

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).



**Gambar I. 1**  
**Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD**

Adapun muatan dari Renja disebutkan dalam Pasal 273 ayat (3), yaitu “Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.”

Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai perangkat daerah telah menyusun **Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025**, dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Namun selanjutnya terkait dinamika perencanaan, telah dilakukan perubahan terhadap RKPD Kota Semarang Tahun 2025 yang disebabkan oleh: 1. karena adanya ketidaksesuaian sisa lebih anggaran yang terpasang di APBD TA 2025 dengan realisasi sementara (unaudited) pada APBD TA 2024, 2. Adanya perkembangan kebijakan terkait dengan efisiensi belanja serta adanya dana transfer yang ditetapkan setelah penetapan APBD TA 2025.

Perubahan RKPD 2025 ini disusun sebagai respons atas dinamika dan perubahan keadaan sebagaimana diuraikan di atas yang mempengaruhi prioritas pembangunan daerah Kota Semarang. Perubahan RKPD 2024 Kota Semarang mengacu pada berbagai kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026, dan Rancangan Akhir RPJMD Kota Semarang Tahun 2025-2029.

Penyusunan Perubahan RKPD 2025 bertujuan untuk: 1. Menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor. 4. Memastikan keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimana Salah satu implikasi dari hal tersebut adalah adanya perubahan target kinerja beberapa program / kegiatan beserta pagu indikatifnya, termasuk pada Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Karena itu maka dipandang perlu untuk melakukan **perubahan terhadap Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025**, sebagai penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Meskipun demikian, perubahan Renja dilakukan dengan tetap memperhatikan target kinerja pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) OPD Kota Semarang Tahun 2025.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- h. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- o. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- q. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
- r. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- s. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang

- Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
- t. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
  - u. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
  - v. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
  - w. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
  - x. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
  - y. Peraturan Walikota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);
  - z. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34).

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen perubahan rencana kerja tahunan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025 dengan berdasarkan pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 dan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025;
- c. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, review terhadap Perubahan RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Memuat perubahan rencana kerja serta perubahan rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada tahun 2025.

### **BAB V PENUTUP**

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG TAHUN 2025**

#### **II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/ permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sampai dengan triwulan II. Juga disajikan capaian target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan tahun 2025 triwulan II, yang menggunakan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

##### **a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025**  
**dan Pencapaian Renstra Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
<b>URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>									
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</b>	<b>46 dok</b>	<b>11 dok</b>	<b>13 dok</b>	<b>4 dok</b>	<b>30,77</b>	<b>15</b>	<b>32,61</b>
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja SKPD)	10 dok	4 dok	4 dok	1 dok	25,00	5 dok	50
		Jumlah Dokumen Renstra SKPD	1 dok	-	1 dok	0 dok	0,00	-	-
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	5 dok	1 dok	1 dok	0 dok	0,00	1 dok	20
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Evaluasi Kinerja OPD	15 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100,00	6 dok	40

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.01.08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	-	1 dok	0 dok	0,00	0 dok	0 dok
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	3 jenis	3 jenis	0	0	0,00	3	100
					2 paket	0	0,00	2	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 jenis	5 jenis	7 paket	3 paket	42,86	8	160
					7 paket	3 paket	42,86	8	160
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 jenis	7 jenis	-	-	-	7 jenis	100
					50 paket	25 paket	50	37 Paket	-
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	-	-	-	8 jenis	100
					8 paket	4 paket	50	4 Paket	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2 jenis	2 jenis	-	-	-	2 jenis	100
					12 dok	6 dok	50	4 dok	-
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	500 orang	12 laporan	12 laporan	8 laporan	50	20 laporan	-

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 kegiatan	300 keg	-	-	-	300 keg	60
				12 laporan	12 laporan	5 laporan	50	17 laporan	-
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 jenis	3 Jenis	-	-	-	3 jenis	60
				1 dokumen	2 dokumen	0 dokumen	0,00	1 dokumen	
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	3 unit	6 unit	10 unit	0 dokumen	0,00	6	200
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	2 unit	2 unit	3 unit	0 dokumen	0,00	2	100
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
				12 laporan	12 laporan	6 laporan	0,00	18 laporan	-
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan aset SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	100

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	25 unit	26 unit	27 unit	27 unit	100,00	27 unit	100
X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel	3 jenis	3 jenis	0	0	0	3 jenis	100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-	5 Jenis	100
				51 Unit	70 unit	51 unit	72,86	102 Unit	-
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100% (60%)</b>	<b>100% (80%)</b>	<b>50% (10%)</b>	<b>50,00</b>	<b>100 (70%)</b>	<b>100 (70%)</b>
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	100%	100%	-	-	-	100%	100
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		55 orang/bulan	77 orang/bulan	77 orang/bulan	100	77 Orang	-
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	100%	100%	-	-	-	100%	100
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50	18 dokumen	-
		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>15 dok</b>	<b>3 dok</b>	<b>3 dok</b>	<b>1 dok</b>	<b>66,67</b>	<b>5 dok</b>	<b>33,33</b>
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 laporan	3 laporan	1 laporan	0	0,00	3 Laporan	60,00
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 laporan	6 laporan	2 laporan	1 laporan	50,00	7 Laporan	70,00

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>3%</b>	<b>100,00</b>
2.17.02.2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>75 koperasi</b>	<b>58 koperasi</b>	<b>15 koperasi</b>	<b>0 koperasi</b>	<b>0,00</b>	<b>58 koperasi</b>	<b>77,33</b>
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang mendapat Fasilitasi Pemenuhan ijin usaha simpan pinjam	150 unit usaha	240 unit usaha	25 unit usaha	0 unit usaha	0,00	240 unit usaha	160
2.17.02.2.02	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>10 koperasi</b>	<b>3 koperasi</b>	<b>2 koperasi</b>	<b>0 koperasi</b>	<b>0,00</b>	<b>3 koperasi</b>	<b>30</b>
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mendapat fasilitasi pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	150 unit usaha	302 unit usaha	25 unit usaha	0 unit usaha	0,00	302 unit usaha	201

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi</b>	<b>50%</b>	<b>68,34%</b>	<b>50%</b>	<b>21,08%</b>	<b>42,16</b>	<b>89,42</b>	<b>178,84</b>
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian</b>	<b>120 koperasi</b>	<b>470 koperasi</b>	<b>100 koperasi</b>	<b>26 koperasi</b>	<b>26,00</b>	<b>496 koperasi</b>	<b>423</b>
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diawasi	175 unit usaha	-	-	-	-	-	-
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa kepatuhannya terhadap perundang-undangan	175 unit usaha	-	-	-	-	-	-
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	-	503 unit usaha	250 unit usaha	100 Unit usaha	40	603 Unit usaha	-
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi sehat</b>	<b>35%</b>	<b>44,00%</b>	<b>33%</b>	<b>16,00%</b>	<b>48,48</b>	<b>60%</b>	<b>171</b>
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah</b>	<b>Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	<b>70%</b>	<b>69,28%</b>	<b>69%</b>	<b>18,20%</b>	<b>26,38</b>	<b>87,48</b>	<b>124,97</b>

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
	<b>Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>								
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	300 unit usaha	345 unit usaha	250 unit usaha	91 unit usaha	36,40	436 unit usaha	145,33
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>10%</b>	<b>41,30%</b>	<b>10%</b>	<b>10,86%</b>	<b>108,6</b>	<b>52,16</b>	<b>521,60</b>
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM Koperasi yang Terampil</b>	<b>80%</b>	<b>98,30%</b>	<b>77%</b>	<b>80,26%</b>	<b>104,23</b>	<b>178,56</b>	<b>223,2</b>
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	400 Orang	580 orang	520 orang	76 orang	14,62	656 orang	164
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi yang meningkat omsetnya</b>	<b>30%</b>	<b>30,82%</b>	<b>28%</b>	<b>21,80%</b>	<b>77,86</b>	<b>52,62</b>	<b>175,4</b>
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha</b>	<b>50%</b>	<b>67,93%</b>	<b>50%</b>	<b>5,57%</b>	<b>11,14</b>	<b>73,5</b>	<b>147</b>

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	-	-	20 Kelompok Masyarakat	16 kelompok masyarakat	80	16 kelompok masyarakat	-
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah unit usaha yang Produktif, berNilai Tambah, memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	-	500	500 unit usaha	39 unit usaha	70,80	539	-
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan</b>	<b>3%</b>	<b>5,47%</b>	<b>3%</b>	<b>2,02%</b>	<b>67,33</b>	<b>7,49</b>	<b>249,67</b>
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitas pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	3000 orang	4469 orang	600orang	617 orang	102,83	5086 orang	169,53

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan usaha	500 unit usaha	-	-	-	-	-	-
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha	500 unit usaha	460 unit usaha	200 unit usaha	92 unit usaha	46,00	552 unit usaha	110
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	-	-	90 Unit Usaha	30 unit usaha	33,33	30 unit usaha	-
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	1000 unit usaha	934 unit usaha	240 unit usaha	30 unit usaha	12,50	964 unit usaha	96,4
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1000 orang	1080 orang	490 orang	0 orang	0,00	1080 orang	108
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	350 Unit Usaha	100 unit usaha	28,57	100 unit usaha	-
2.17.07.2.01.11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	-	-	400 Unit Usaha	52 unit usaha	13,00	52 unit usaha	-
2.17.07.2.01.06	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	750 orang	2780 orang	1540 orang	795 orang	51,62	3575 orang	476,67,67
<b>2.17.08</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>25%</b>	<b>53,28%</b>	<b>20%</b>	<b>6,43%</b>	<b>32,15</b>	<b>59,71</b>	<b>238,84</b>
<b>2.17.08.2.01</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>600 orang</b>	<b>2154 orang</b>	<b>100 orang</b>	<b>45 orang</b>	<b>45,00</b>	<b>2199 orang</b>	<b>366,50</b>

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Akhir Periode Renstra	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025			Realisasi Capaian Target Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025	
					Target Renja Tahun 2025	Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Kinerja s/d Triwulan II Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10 = (9/4)
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	3.000 unit usaha	5634 unit usaha	1200 unit usaha	110 unit usaha	9,17	5744 unit usaha	191,47
		Pengembangan Co Working Space	5 paket	1 paket	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Pencapaian kinerja program pada Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sampai dengan Triwulan II tergolong baik, ditunjukkan dari 8 indikator program sebagai ukuran keberhasilan, sebanyak 4 indikator kinerja program dengan predikat tercapai (termasuk program penunjang) , 3 indikator memiliki predikat akan tercapai, dan 1 indikator dengan predikat perlu upaya keras, yaitu : Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

Hal ini disebabkan karena adanya perubahan persyaratan izin usaha simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang sebelumnya diatur melalui Keputusan Menteri No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi, dimana koperasi mengalami kesulitan dalam proses pemenuhan syarat ijin usaha simpan pinjam yang baru antara lain adalah Bukti modal setor yang dibutuhkan untuk mengurus izin usaha simpan pinjam yang sebelumnya Rp. 15.000.000,- menjadi Rp. 500.000.000,-.

#### b. Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 serta realokasi anggaran pada program, Kegiatan dan sub Kegiatan. Adapun rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2**  
**Realisasi Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang s/d Triwulan II Tahun 2025**

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.583.322.152	13.188.787.774	5.776.218.177	43,80
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.849.400	53.012.783	1.868.200	3,52
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.143.000	3.499.000	0	0,00

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.891.400	1.001.400	0	0,00
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.900	1.250.900	0	0,00
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	1.179.400	645.400	608.800	94,33
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.458.900	834.900	0	0,00
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.885.800	1.368.600	1.259.400	92,02
2	17	1	2.01	8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	50.000.000	44.412.583	0	0,00
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.757.319.600</b>	<b>11.757.207.200</b>	<b>5.502.858.747</b>	<b>46,80</b>
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.486.646.000	11.486.646.000	5.397.321.247	46,99
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	269.664.000	269.664.000	105.260.000	39,03
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	448.600	336.200	277.500	82,54
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	561.000	561.000	0	0,00
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>861.267.355</b>	<b>582.665.475</b>	<b>85.094.720</b>	<b>14,60</b>
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	171.784.366	171.784.366	0	0,00
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.114.840	22.114.840	5.049.500	22,83
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.000.300	24.482.740	6.453.000	26,36
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.020.437	25.404.117	1.450.000	14,35
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	1.920.000	900.000	46,88
2	17	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.000.000	30.000.000	12.753.100	42,51
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	409.751.860	157.283.860	58.489.120	37,19
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	149.675.552	149.675.552	0	0,00
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53.101.912</b>	<b>53.101.912</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6	6	6	6	5	Pengadaan Mebel	7.284.264	7.284.264	0	0,00
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.817.648	45.817.648	0	0,00
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>313.530.000</b>	<b>313.530.000</b>	<b>46.204.642</b>	<b>14,74</b>
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.530.000	313.530.000	46.204.642	14,47

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>488.253.885</b>	<b>429.270.404</b>	<b>140.191.868</b>	<b>32,66</b>
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.603.603	35.955.000	14.375.356	39,98
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	401.550.296	346.215.418	115.936.512	33,49
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.099.986	47.099.986	9.880.000	20,98
2	17	2			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>150.000.000</b>	<b>39.065.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	17	2	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>20.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	20.900.000	0	0,00
2	17	2	2.02		<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>75.000.000</b>	<b>18.165.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
2	17	2	2.02	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	18.165.000	0	0,00
2	17	3			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>504.320.000</b>	<b>179.002.720</b>	<b>36.300.000</b>	<b>20,28</b>
2	17	3	2.01		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>504.320.000</b>	<b>179.002.720</b>	<b>36.300.000</b>	<b>20,28</b>
2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	504.320.000	179.002.720	36.300.000	20,28

2	17	4			<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>394.320.000</b>	<b>242.867.790</b>	<b>110.747.000</b>	<b>45,60</b>
2	17	4	2.01		<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>394.320.000</b>	<b>242.867.790</b>	<b>110.747.000</b>	<b>45,60</b>
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	394.320.000	242.867.790	110.747.000	45,60
2	17	5			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>601.700.000</b>	<b>253.964.240</b>	<b>57.744.500</b>	<b>22,74</b>
2	17	5	2.01		<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>601.700.000</b>	<b>253.964.240</b>	<b>57.744.500</b>	<b>22,74</b>
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	601.700.000	253.964.240	57.744.500	22,74
2	17	6			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>2.092.353.680</b>	<b>955.495.141</b>	<b>167.740.280</b>	<b>17,56</b>
2	17	6	2.01		<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.092.353.680</b>	<b>955.495.141</b>	<b>167.740.280</b>	<b>17,56</b>
2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	6	2.01	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1.687.353.680	742.445.141	125.650.280	16,92
2	17	7			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>6.456.538.390</b>	<b>4.811.458.993</b>	<b>863.392.020</b>	<b>17,94</b>
2	17	7	2.01		<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>6.456.538.390</b>	<b>4.811.458.993</b>	<b>863.392.020</b>	<b>17,94</b>
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	138.996.000	73.247.820	34.592.500	47,23
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50.000.000	21.764.102	13.948.300	64,09

2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	726.306.840	616.397.520	60.395.530	9,80
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1.201.410.000	1.084.145.116	41.625.000	3,84
2	17	7	2.01	8	Pemulihan Usaha Mikro	267.544.400	184.595.150	106.718.910	57,81
2	17	7	2.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	1.149.184.000	573.368.990	30.964.300	5,40
2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>3.806.038.268</b>	<b>2.941.117.540</b>	<b>870.235.670</b>	<b>29,59</b>
<b>2</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>3.806.038.268</b>	<b>2.941.117.540</b>	<b>870.235.670</b>	<b>29,59</b>
2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
<b>JUMLAH</b>						<b>27.588.592.490</b>	<b>22.611.759.198</b>	<b>7.882.377.647</b>	<b>34,86</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 urusan, 8 program, dan 14 kegiatan dan 40 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah sebesar Rp 27.588.592.490,- yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 25.488.592.490,- dan DBHCHT sebesar Rp. 2.100.000.000,-. Namun dengan adanya Inpres I Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, anggaran pada Dinas koperasi dan usaha Mikro berkurang menjadi Rp. 22.611.759.198,-

Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp 7.882.377.647,- (34,86%) . Adapun sisa anggaran yang belum digunakan adalah sebesar Rp 14.729.381.551,- ( 65,14% ).

## II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah melaksanakan fungsi dan tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di Kota Semarang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 3**  
**Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR	TARGET RENSTRA						REALISASI					PROYEKSI	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025 TW II	2026	2025
<b>Tujuan:</b>														
Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	50,70	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	-	65,42	58,91	59,72	51,56	-	56,00
Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	10,24	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	-	16,93	17,17	17,40	17,46	-	17,50
<b>Sasaran:</b>														
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	Persentase Koperasi aktif	88,72	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	88,61	76,63	77,04	77,58	82,57	-	83,00
Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	-	40,58	42,53	44,41	44,89	-	45,00
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai AKIP	77,13	77,20	77,50	77,75	78,00	78,50	81,08	79,71	80	80,25	80,45	-	80,45

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Adapun hasil analisis dari pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan **“Meningkatnya kapasitas kelembagaan, kualitas penyelenggaraan dan keberdayaan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “persentase koperasi yang berkualitas”, sampai dengan Triwulan II 2025 tercapai sebesar 51,56 % dari target sebesar 56,00 % atau baru sebesar 92,07 %.
- b. Tujuan **“Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2025 sudah sebesar 17,46 % dari target sebesar 15,00% (capaian sebesar 116,40 %);
- c. Sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase koperasi aktif”, telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2025 sudah sebesar 82,57% dari target sebesar 77,50% (capaian sebesar 106,54%);
- d. Sasaran **“Meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro”, sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tercapai sebesar 44,89 % dari target 45,00 % (capaian sebesar 99,76 %);
- e. Sasaran **“Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah”** memiliki 1 indikator kinerja yaitu “Nilai AKIP” telah dapat melebihi target, dimana realisasi sampai Triwulan II tahun 2025 realisasinya sebesar 80,45% dari target sebesar 78,00% (capaian sebesar 103,14%);

Selain dari aspek capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 4**  
**Kesesuaian Program antara RPJMD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD Kota Semarang Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

NO	INDIKATOR	TARGET					REALISASI KINERJA				PROYEKSI	
		2022	2023	2024	2025	2026	2023	2023	2024	TW-II 2025	2025	2026
1	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang*

Selanjutnya, selain realisasi dari target Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang juga perlu dicermati realisasi dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2. 5**  
**Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)**  
**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang**  
**Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025**

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET					REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA				PROYEKSI		CAT
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025 TW II	2025	2026	
1	Persentase koperasi aktif	%	76%	76,50%	77%	77,5%	78%	76,63%	77,04%	77,58%	82,57%	77,50%	78%	
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	12%	13%	14%	15%	16%	16,93%	17,17%	17,40%	17,46%	17,50%	17,60%	
3	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53%	54%	55%	56%	57%	65,42%	58,91%	59,72%	51,56%	56%	57%	

*Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang*

Dari tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah 2 indikator sudah melampaui target yaitu Indikator Persentase Koperasi Aktif dan Indikator Meningkatnya usaha Mikro menjadi wirausaha, sedangkan 1 indikator yaitu Meningkatnya Koperasi yang berkualitas masih dalam tahap pencapaian target.

Untuk selanjutnya sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, maka selain memenuhi capaian IKD di atas, semua kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dalam pelaksanaannya diarahkan pada kegiatan yang responsif Gender. Dimana dari 8 program, 14 kegiatan, dan 40 sub kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di tahun 2025 ini yang telah dibuatkan GAP dan GBS adalah sebanyak 3 program (37,50%), 3 kegiatan (21,43 %) dan 3 sub kegiatan (7,50 %).

Dari jumlah anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di tahun 2025 yang sebesar Rp 27.588.592.490,- jumlah anggaran yang responsif gender (anggaran sub kegiatan yang telah memiliki GAP dan GBS) adalah sebesar Rp 7.134.135.418,- (25,86 %).

**Tabel 2.6**  
**Anggaran Responsif Gender**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**  
**Tahun 2025**

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	6			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan	405.000.000	213.050.000	42.090.000	19,76
2	17	7			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47

Kode Rekening					Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN II (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSEN (%)
2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	2.923.097.150	2.257.940.295	575.147.480	25,47
2	17	8			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>3.806.038.268</b>	<b>2.941.117.540</b>	<b>870.235.670</b>	<b>29,59</b>
2	17	8	2.01		<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>3.806.038.268</b>	<b>2.941.117.540</b>	<b>870.235.670</b>	<b>29,59</b>
2	17	8	2.01	6	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	3.806.038.268	2.941.117.540	870.235.670	29,59
<b>JUMLAH</b>						<b>7.134.135.418</b>	<b>5.412.107.835</b>	<b>1.487.473.150</b>	<b>27,48</b>

### II.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Secara umum kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Renja Tahun 2025 maupun Renstra Tahun 2021-2026 sudah on the track. Beberapa target yang ditetapkan telah dapat dicapai, sementara target indikator lainnya masih dalam proses pencapaian

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Mikro, diantaranya:

- a. Keterbatasan kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Pengurus/pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang

- b. Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha Mikro di Kota Semarang terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga Keuangan Perbankan/Non Perbankan;
- c. Masih banyaknya produk Usaha Mikro yang belum memiliki Sertifikasi produk antara lain PIRT, HALAL dan HAKI.
- d. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mikro di Kota Semarang tentang strategi pemasaran modern serta pemanfaatan teknologi digitalisasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun Rencana Tindak lanjut yang akan dilakukan :

- a. Optimalisasi pelatihan Perkoperasian dan Uji Kompetensi bagi pengelola Koperasi dan pelatihan manajemen kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Mikro;
- b. Melaksanakan fasilitasi kolaborasi antara usaha mikro dan Perusahaan besar serta Lembaga keuangan untuk memfasilitasi akses terhadap modal dan pembiayaan.
- c. Memberikan fasilitasi perlindungan produk usaha Mikro antara lain dengan Fasilitasi Sertifikasi PIRT, HALAL dan HAKI kepada Pelaku Usaha Mikro secara berkelanjutan.
- d. Memberikan pelatihan pemasaran digital, melaksanakan kemitraan dengan marketplace secara berkelanjutan.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. Tantangan:
  - Pengetahuan masyarakat tentang koperasi relatif terbatas sehingga mempengaruhi persepsi koperasi di mata masyarakat. Koperasi sering dipandang sebagai lembaga pranata sosial saja bukan sebagai organisasi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi anggotanya.

- Keterbatasan kemampuan pelaku usaha mikro untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital.
- kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro.
- Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat belum dioptimalkan oleh pelaku usaha mikro dalam pemasaran.
- Kemampuan dan Pengetahuan Teknologi Informasi KUMKM masih terbatas.
- Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dimana pada setiap desa/kelurahan diharapkan untuk membentuk Koperasi Merah Putih.

b. Peluang:

- Tren Pertumbuhan UMKM yang potensial di Kota Semarang.
- Adanya komitmen kebijakan dari Pemerintah terkait kemudahan Perijinan dan penyaluran pembiayaan kepada UMKM.
- Teknologi Informasi dan kesepakatan pasar bebas membuka peluang pasar yang lebih luas yang memaksa UMKM untuk berkompetisi.
- Beragamnya Produk UMKM serta Sumber daya alam yang masih melimpah.
- Pembangunan infrastruktur secara massif memudahkan pergerakan arus barang/jasa.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut:

Isu – isu strategis :

1. Perlunya peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM pengelola Koperasi dan Usaha Mikro supaya lebih mempunyai daya saing.
2. Perlunya mendorong Peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.
3. Belum optimalnya akses Pemasaran dan pemanfaatan teknologi digitalisasi terhadap peluang pasar.

4. Belum optimalnya respon dari Pelaku usaha terhadap pengembangan usaha pada platform digital.
5. Perlunya dukungan penguatan kelembagaan serta peningkatan kompetensi bagi pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang merupakan koperasi jenis baru.

#### **II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD**

Rancangan Perubahan RKPD merupakan acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan Perubahan Renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Terkait penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, dilakukan review terhadap Rancangan Perubahan RKPD, yaitu membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 7**  
**Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23.937.632.864	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23.937.632.864
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.847.006.290	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD	100%	11.847.006.290	
		Kota Semarang	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%			Kota Semarang	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur	100%		
		Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%			Kota Semarang	Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD	100%		
		Kota Semarang	Presentase Peningkatan Kemampuan ASN	100%							
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	53.012.783	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	9 dok	53.012.783	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	3.499.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	3.499.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.001.400	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1.001.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.250.900	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1.250.900	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	645.400	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	645.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	834.900	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	834.900	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.368.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.368.600	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Usaha Mikro					Usaha Mikro				
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	44.412.583	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dok	44.412.583	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>3 dok</b>	<b>10.795.554.330</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>3 dok</b>	<b>10.795.554.330</b>	
			<b>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	10.525.097.130	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Semarang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 org/bln	10.525.097.130	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.560.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	269.560.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	336.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	336.200	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	561.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>461.464.228</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>461.464.228</b>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	153.985.050	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	153.985.050	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	22.114.840	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	24.482.740	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	24.482.740	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	25.254.117	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	25.254.117	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
		Usaha Mikro					Usaha Mikro				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.920.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	55.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.647.482	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	178.647.482	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	60.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	60.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100 Persen</b>	<b>90.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100 Persen</b>	<b>90.000</b>	
	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	45.000	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	45.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	45.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100 Persen</b>	<b>107.614.545</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100 Persen</b>	<b>107.614.545</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.614.545	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	107.614.545	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Pemeliharaan aset SKPD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>429.270.404</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Pemeliharaan aset SKPD</b>	<b>100 Persen</b>	<b>429.270.404</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.955.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinas Koperasi dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27 Unit	346.215.418	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dinas Koperasi dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27 Unit	346.215.418	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Usaha Mikro	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Usaha Mikro	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi & Usaha Mikro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47.099.986	
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>3%</b>	<b>39.065.000</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor Cabang, Cabang pembantu dan kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>3%</b>	<b>39.065.000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>15 kop</b>	<b>20.900.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>15 Kop</b>	<b>20.900.000</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	20.900.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	20.900.000	
	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>2 kop</b>	<b>18.165.000</b>	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>2 Kop</b>	<b>18.165.000</b>	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	18.165.000	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 Unit Usaha	18.165.000	

No	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	158.160.000	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Kota Semarang	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	50%	158.160.000	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	158.160.000	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian	100 kop	158.160.000	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	158.160.000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha	158.160.000	
	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33 Persen	263.710.510	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	Kota Semarang	Persentase Koperasi sehat	33 Persen	263.710.510	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	69%	263.710.510	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya	68%	263.710.510	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha	263.710.510	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	200 Unit Usaha	263.710.510	
	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	549.819.918	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Kota Semarang	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan	10%	549.819.918	
			Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%				Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan	1%		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	549.819.918	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Semarang	Persentase SDM Koperasi yang Terampil	77%	549.819.918	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Dinas Koperasi dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	640 org	549.819.918	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Dinas Koperasi dan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	640 org	549.819.918	

No	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Usaha Mikro				Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Usaha Mikro				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase koperasi yang meningkat omsetnya</b>	<b>28%</b>	<b>1.211.844.613</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase koperasi yang meningkat omsetnya</b>	<b>28%</b>	<b>1.211.844.613</b>	
	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha</b>	<b>50%</b>	<b>1.211.844.613</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha</b>	<b>50%</b>	<b>1.211.844.613</b>	
	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	26 Kelompok Masyarakat	411.755.150	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	26 Kelompok Masyarakat	<b>411.755.150</b>	
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 org	800.089.463	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	500 Unit Usaha	800.089.463	
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan</b>	<b>3%</b>	<b>6.510.208.993</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan</b>	<b>3%</b>	<b>6.510.208.993</b>	
	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan</b>	<b>600 org</b>	<b>6.510.208.993</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan</b>	<b>600 org</b>	<b>6.510.208.993</b>	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	410 Unit Usaha	1.592.942.320	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	410 Unit Usaha	1.592.942.320	

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)		(3)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	21.764.102	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	30 Unit Usaha	21.764.102	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha	606.778.860	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	150 Unit Usaha	606.778.860	
	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 org	1.114.145.116	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100 org	1.114.145.116	
	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	180.845.150	Pemulihan Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	180.845.150	
	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	582.987.650	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	250 Unit Usaha	582.987.650	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1060 org	2.410.745.795	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	1060 org	2.410.745.795	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>20%</b>	<b>3.357.817.540</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>20%</b>	<b>3.357.817.540</b>	
	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>100 org</b>	<b>3.357.817.540</b>	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Kota Semarang</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>100 org</b>	<b>3.357.817.540</b>	
	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	3.357.817.540	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	700 Unit Usaha	3.357.817.540	

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

## II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2025 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2024, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kota. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis, dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait.

Untuk Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, untuk perencanaan tahun 2025 terdapat aspirasi masyarakat berupa usulan kegiatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sebagai berikut :

**Tabel 2. 8**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	Pelatihan Manajemen dan Administrasi Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
2.	Sosialisasi Legalitas Usaha	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
3.	Sosialisasi Pemasaran melalui Market Place	Kelurahan Plalangan	1 Kegiatan	Diakomodir
4.	Pelatihan ber Koperasi bagi Pengurus dan Anggota UMKM Kelurahan Sadeng	Kelurahan Sadeng	1 Kegiatan	Diakomodir
5.	Bantuan Modal usaha ekonomi Produktif bagi UMKM	Kelurahan Sendangmulyo	25 Orang	Tidak diakomodir (Dinas hanya memfasilitasi akses Pembiayaan bukan Bantuan Modal Usaha)
6.	Bazar UMKM se kelurahan Bulusan	Kelurahan Bulusan	1 Kegiatan	Tidak diakomodir karena Dinkop menyelenggarakan pameran pada Tingkat Kota (bisa diakomodir Kecamatan)
7.	Pelatihan pemasaran dan manajemen usaha	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir

NO	USULAN	LOKASI	BESARAN / VOLUME	CATATAN / TANGGAPAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
8.	Pelatihan pembuatan garnis dan pelatihan packing	Kelurahan Sambiroto	60 Orang	Diakomodir
9.	Pelatihan Penentuan Harga Jual dan Costing Bagi UMKM Agar Tidak Rugi	Kelurahan Jangli	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan Manajemen Kewirausahaan)
10.	UMKM Kelurahan Kedungmundu pemasaran secara online kurang berjalan	Kelurahan Kedungmundu	50 Orang	Diakomodir (Pelatihan digitalisasi Pemasaran )
11.	Pelatihan packaging produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis Produknya
12.	Pelatihan Manajemen pemasaran produk UMKM Kampung Tematik Hasta Karya	Kelurahan Tembalang	1 Kegiatan	Diakomodir
13.	Pelatihan Sertifikasi Produk UMKM	Kelurahan Tambakrejo	1 Kegiatan	Diakomodir dengan catatan perlu Kejelasan jenis sertifikasi produknya ( Halal, PIRT, HAKI)

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

Disamping itu juga terdapat aspirasi dari hasil reses DPRD Kota Semarang sesuai kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, yaitu :

1. Event yang dapat menggerakkan roda perekonomian di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan agar ditingkatkan terutama pemberdayaan UMKM.
2. Pemkot Semarang diharapkan membantu UMKM dengan modal usaha, alat dan juga pelatihan agar lebih memaksimalkan produktivitas usahanya.
3. Diperlukan peningkatan perekonomian masyarakat dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif. Program pemberdayaan rumah tangga melalui program penguatan UMKM, pelatihan-pelatihan usaha mikro masyarakat dan pemberian bantuan sarana usaha produktif.
4. Perlu pelatihan Marketing di jaman digital untuk UMKM
5. Perlu upgrade UMKM di jaman digital

Dari 11 usulan yang diakomodir serta hasil aspirasi DPRD Kota Semarang tersebut diatas sampai dengan triwulan II Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang sudah mengakomodir semua usulan melalui kegiatan Fasilitasi Pelatihan ketrampilan dan manajemen kewirausahaan, sosialisasi legalitas usaha/NIB, fasilitasi sertifikasi Halal, HAKI, PIRT, pelatihan Digitalisasi Pemasaran bagi pelaku usaha mikro di kota semarang serta Pelatihan dan uji komeptensi bagi pengurus koperasi.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

**3.1. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Untuk tahun 2025 tema yang diangkat dalam RKP adalah “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” yang tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 8 Prioritas Nasional.

Adapun 8 Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan indikator dan target Sasaran Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,30 – 5,60%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 4,50 – 5,00%
3. Rasio Gini nilai 0,379 – 0,382
4. Indeks Modal Manusia nilai 0,56
5. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,00 – 8,00%

Kemudian pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Tahun 2024-2026. Visi pembangunan Jawa Tengah yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

Kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan berkelanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Sedangkan target Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. Angka kemiskinan sebesar 9,28-8,08%;
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,80-5,60%;
3. Inflasi sebesar  $2,5 \pm 1\%$ ;
4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20-4,60%.

Selanjutnya pada tingkat kota, pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Semarang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial yang Merata”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Prioritas 1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan;
- Prioritas 2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas;
- Prioritas 3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia;
- Prioritas 4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan;
- Prioritas 5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan;
- Prioritas 6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Prioritas 7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang;
- Prioritas 8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2024 tersebut secara rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang berkeadilan, dengan fokus pada penyediaan beasiswa bagi warga miskin dan siswa/mahasiswa berprestasi, Pemberian kartu bus gratis untuk pelajar dan mahasiswa, Penyelesaian ijazah yang tertahan di sekolah swasta pengurangan beban pengeluaran siswa, perbaikan ruang kelas yang rusak berat, penyediaan Rumah Inspirasi bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.

2. Penyediaan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada perluasan layanan UHC, rintisan penyediaan layanan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja rentan, pembangunan Pustu dan Puskesmas.
3. Peningkatan pemenuhan penyediaan infrastruktur dasar, terutama yang mendukung upaya penguatan Sumber Daya Manusia dan pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada penyediaan dan peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah melalui penyelesaian permasalahan kondisi infrastruktur permukiman dan kota yang mendesak, penyediaan infrastruktur dasar permukiman dan perkotaan, serta penyiapan dokumen pendukung untuk pekerjaan infrastruktur strategis;
4. Peningkatan aktifitas penunjang perekonomian serta Penyediaan sarana dan prasarana penunjang ekonomi yang berkeadilan, dengan fokus kepada perbaikan dan peningkatan fungsi sarana prasarana perdagangan dan jasa, penyelenggaraan event-event seni dan budaya, penguatan akses lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penguatan sistem pangan perkotaan, serta pengembangan usaha mikro.
5. Penguatan perlindungan sosial yang berkeadilan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, peningkatan pengelolaan manajemen sumber daya air, dan penyelesaian sarana dan prasarana pengendalian banjir dan rob yang mendesak dan menyeluruh dari hulu sampai ke hilir.
7. Peningkatan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam mendukung program dan kinerja Pemerintah Kota Semarang, dengan fokus kepada peningkatan keterlibatan elemen masyarakat untuk mendukung kinerja Pemerintah Kota Semarang, mulai dari lingkungan terkecil (Rukun Tetangga - RT).
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif, dengan fokus pada penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan, dan Peningkatan kualitas aparatur sipil negara.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2025 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang Tahun 2025, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,80 – 6,50%;
- 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 84,80 – 85,80;
- 3) Angka Kemiskinan sebesar 3,98 – 3,74%;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,61 – 5,31%.

### **3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025, yaitu:

- 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi**
- 2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro**

dengan indikator tujuan :

- 1. Persentase Koperasi yang Berkualitas**
- 2. Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha**

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Kota Semarang yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi**
- b. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**
- c. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah**

dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. **Persentase Koperasi aktif**
- b. **Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro**
- c. **Nilai AKIP**

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 serta menyesuaikan Capaian realisasi pada tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3. 1**  
**Target Indikator Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025**

<b>TUJUAN / SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
<b>TUJUAN :</b>			
1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas penyelenggaraan serta keberdayaan koperasi	- Persentase Koperasi yang Berkualitas	%	59,80
2. Meningkatnya keberdayaan pelaku usaha mikro	- Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	17,50
<b>SASARAN :</b>			
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, kelembagaan dan kesehatan koperasi	- Persentase Koperasi aktif	%	77,60
2. Meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	- Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	45,00
3. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan perangkat daerah	- Nilai AKIP	%	80,35

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**

**4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025 serta Renstra Perubahan Kedua Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.
2. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2025-2029 : **“KOTA SEMARANG MENJADI PUSAT EKONOMI YANG MAJU, BERKEADILAN SOSIAL, LESTARI DAN INKLUSIF”**, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Semarang. Dimana Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang mendukung pencapaian pokok Visi ke-2 : *“Pusat Ekonomi yang Berkeadilan, social, Sejahtera dan inklusif”* serta Misi ke 3 **“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berupa Ketersediaan Pangan, Sandang, Dan Papan Yang Merupakan Elemen Kunci Agar Tercapai Taraf Hidup Yang Layak ”**. Namun secara khusus, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang memiliki peran dalam pencapaian indikator tujuan “Rasio Gini” dan indikator sasaran “PDRB per Kapita” melalui indikator *“Rasio Kewirausahaan Daerah”*.
3. Keselarasan program dan kegiatan antara Kebijakan Nasional, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Semarang di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pembangunan daerah Kota Semarang;

5. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan;
7. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program / kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku;
8. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 disertai indikator, pagu indikatif serta sumber pendanaannya tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 4. 1**  
**Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025**  
**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang**

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>										
<b>X.XX.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>13.901.894.152</b>	<b>13.583.322.152</b>	<b>11.847.006.290</b>	<b>APBD</b>	
		<b>Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-				
		<b>Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-				
<b>X.XX.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan</b>	<b>9 dok</b>	<b>9 dok</b>	<b>9 dok</b>	<b>109.849.400</b>	<b>109.849.400</b>	<b>53.012.783</b>	<b>APBD</b>	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	4 dok	5 dok	51.143.000	51.143.000	3.499.000	APBD	
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.891.400	1.891.400	1.001.400	APBD	
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	2.290.900	2.290.900	1.250.900	APBD	
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.179.400	1.179.400	645.400	APBD	
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1.458.900	1.458.900	834.900	APBD	
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Lap	3 Lap	3 Lap	1.885.800	1.885.800	1.368.600	APBD	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	44.412.58	APBD	
<b>X.XX.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>12.075.891.600</b>	<b>11.757.319.600</b>	<b>10.795.554.330</b>	<b>APBD</b>	
		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD</b>	<b>3 dok</b>	<b>3 dok</b>	<b>3 dok</b>	-	-	-		
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	11.805.218.000	11.486.646.000	10.525.097.130	APBD	
X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	10 dok	12 Dokumen	269.664.000	269.664.000	269.560.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1 lap	448.600	448.600	336.200	APBD	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 lap	2 lap	1 lap	561.000	561.000	561.000	APBD	
<b>X.XX.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>861.267.355</b>	<b>861.267.355</b>	<b>461.464.228</b>	<b>APBD</b>	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	171.784.366	171.784.366	153.985.050	APBD	
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	7 paket	7 paket	22.114.840	22.114.840	22.114.840	APBD	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50 paket	50 paket	40.000.300	40.000.300	24.482.740	APBD	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	26.020.437	26.020.437	25.254.117	APBD	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	12 dok	1.920.000	1.920.000	1.920.000	APBD	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	12 lap	12 lap	40.000.000	40.000.000	55.000.000	APBD	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	12 lap	409.751.860	409.751.860	178.647.482	APBD	
X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	2 dok	2 dok	149.675.552	149.675.552	60.000	APBD	
<b>X.XX.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>53.101.912</b>	<b>53.101.912</b>	<b>90.000</b>	<b>APBD</b>	
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	7.284.264	7.284.264	45.000	APBD	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit	3 unit	45.817.648	45.817.648	45.000	APBD	
<b>X.XX.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya kebutuhan jasa kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>313.530.000</b>	<b>313.530.000</b>	<b>107.614.545</b>	<b>APBD</b>	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	12 lap	313.530.000	313.530.000	107.614.545	APBD	
<b>X.XX.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan aset SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>488.253.885</b>	<b>488.253.885</b>	<b>429.270.404</b>	<b>APBD</b>	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	39.603.603	39.603.603	35.955.000	APBD	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dan dibayarkan Pajaknya								
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 unit	27 unit	27 unit	401.550.296	401.550.296	346.215.418	APBD	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0	0	0	0	0	0		
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	70 unit	70 unit	47.099.986	47.099.986	47.099.986	APBD	
<b>2.17.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>39.065.000</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.17.02.2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Koperasi yang mengajukan ijin usaha simpan pinjam</b>	<b>15 kop</b>	<b>15 kop</b>	<b>15 kop</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>20.900.000</b>	<b>APBD</b>	
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	75.000.000	75.000.000	20.900.000	APBD	
<b>2.17.02.2.02</b>	<b>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang mengajukan ijin pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam</b>	<b>2 kop</b>	<b>2 kop</b>	<b>2 kop</b>	<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>18.165.000</b>	<b>APBD</b>	
2.17.02.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25 unit usaha	25 unit usaha	25 unit usaha	75.000.000	75.000.000	18.165.000	APBD	
<b>2.17.03</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>504.320.000</b>	<b>504.320.000</b>	<b>158.160.000</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.17.03.2.01</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa yang mematuhi Regulasi Perkoperasian</b>	<b>100 koperasi</b>	<b>100 koperasi</b>	<b>100 koperasi</b>	<b>504.320.000</b>	<b>504.320.000</b>	<b>158.160.000</b>	<b>APBD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
2.17.03.2.01.04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	370 unit usaha	370 unit usaha	370 unit usaha	504.320.000	504.320.000	158.160.000	APBD	
<b>2.17.04</b>	<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi sehat</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>33%</b>	<b>394.320.000</b>	<b>394.320.000</b>	<b>263.710.51</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.17.04.2.01</b>	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase usaha Simpan pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>	<b>69%</b>	<b>394.320.000</b>	<b>394.320.000</b>	<b>263.710.51</b>	<b>APBD</b>	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	250 unit usaha	250 unit usaha	200 unit usaha	394.320.000	394.320.000	263.710.51	APBD	
<b>2.17.05</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>601.700.000</b>	<b>601.700.000</b>	<b>549.819.918</b>	<b>APBD</b>	
		<b>Persentase pelaku usaha mikro yang diberi dukungan fasilitasi Pelatihan</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.17.05.2.01</b>	<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SDM Koperasi yang Terampil</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>77%</b>	<b>601.700.000</b>	<b>601.700.000</b>	<b>549.819.918</b>	<b>APBD</b>	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	520 org	520 org	640 org	601.700.000	601.700.000	549.819.918	APBD	
<b>2.17.06</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase koperasi yang meningkat omsetnya</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>28%</b>	<b>2.060.280.000</b>	<b>2.092.353.680</b>	<b>1.211.844.61</b>	<b>APBD</b>	
<b>2.17.06.2.01</b>	<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Penguatan dan perlindungan Koperasi, Kemitraan, pendampingan kelembagaan, dan pendampingan usaha</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	<b>2.060.280.000</b>	<b>2.092.353.680</b>	<b>1.211.844.61</b>	<b>APBD</b>	
2.17.06.2.01.03	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	26 Kelompok Masyarakat	405.000.000	405.000.000	411.755.150	APBD	
2.17.06.2.01.05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	1.655.280.000	1.687.353.680	800.089.463	APBD	
<b>2.17.07</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>3%</b>	<b>4.360.294.000</b>	<b>6.456.538.390</b>	<b>6.510.208.993</b>	<b>APBD</b>	

Kode Rekening	Urusan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Pagu Anggaran			Sumber Dana	Keterangan
			Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	APBD TA 2025	Perubahan Renja 2025		
		usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan								
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha, pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan	600 org	600 org	600 org	4.360.294.000	6.456.538.390	6.510.208.993	APBD	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	200 unit usaha	200 unit usaha	410 unit usaha	228.700.000	138.996.000	1.592.942.320	APBD	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	50.000.000	50.000.000	21.764.102	APBD	
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	120 unit usaha	240 unit usaha	150 unit usaha	210.270.000	726.306.840	606.778.860	PAD + DBHCHT	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	490 org	490 org	100 org	1.201.410.000	1.201.410.000	1.114.145.116	APBD	
2.17.07.2.01.08	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	350 Unit Usaha	350 Unit Usaha	150 Unit Usaha	203.830.000	267.544.400	180.845.150	APBD	
2.17.07.2.01.11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standarisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	400 Unit Usaha	400 Unit Usaha	250 Unit Usaha	1.149.184.000	1.149.184.000	582.987.650	APBD	
2.17.07.2.01.15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	880 org	1540 org	1060 org	1.316.900.000	2.923.097.150	2.410.745.795	PAD + DBHCHT	
2.17.08	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	<b>3.515.784.338</b>	<b>3.806.038.268</b>	<b>3.357.817.540</b>	<b>APBD</b>	
2.17.08.2.01	<b>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</b>	<b>Jumlah pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya</b>	<b>100 org</b>	<b>100 org</b>	<b>100 org</b>	<b>3.515.784.338</b>	<b>3.806.038.268</b>	<b>3.357.817.540</b>	<b>APBD</b>	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1200 unit usaha	1200 unit usaha	700 unit usaha	3.515.784.338	3.806.038.268	3.357.817.540	APBD	
<b>JUMLAH</b>						<b>25.488.592.490</b>	<b>27.588.592.490</b>	<b>23.937.632.864</b>		

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, 2025

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini memuat tujuan dan sasaran, penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta penyesuaian target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Semarang;
2. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini berpedoman pada Perubahan Kedua Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2025 telah termuat dalam Perubahan Renja; dimana telah dilakukan penyesuaian nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat penambahan *output* / keluaran sub kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
3. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang ini juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Semarang Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **b. Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;
2. Dalam penyusunan RDPPA dan DPPA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Semarang serta hasil pembahasan bersama DPRD Kota Semarang.

**c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 pada triwulan empat tahun 2025.

Selanjutnya program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan *stakeholder* pembangunan di Kota Semarang.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 28 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG

  
MARGARITHA MITA DEWI SOPA, S.E., M.M



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jln. Pemuda No. 175 Telp. (024) 3584086 Fax. 3584085 Hunting 3584077 Psw. 2710, 2712

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**  
**NOMOR : B/3847/050/VII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dengan perkembangan dan perubahan kondisi yang terjadi, telah dilakukan Perubahan terhadap RKPD Kota Semarang tahun 2025;
- b. Bahwa untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 60);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang;
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 34);
17. Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Nomor B/210/050/XII/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2021-2026.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :
- a. Menghimpun data dan informasi dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025;
  - b. Menelaah data dan informasi serta menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 yang selaras dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025;
  - c. Melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2025 kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA agar berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kota Semarang



MARGARITHA MITA DEWI SOPA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SEMARANG NOMOR : B/3847/050/VII/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA  
SEMARANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1	Margaritha Mita Dewi Sopa, SE,MM	Kepala Dinas	PenanggungJawab
2	Dra. Sri Hastyati, SH, MM	Sekretaris Dinas	Ketua
3	Sri Yatun, SE	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi	Sekretaris
4	Iin Indriawati Dewi Mayasari, SH	Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi	Anggota
5	Dwi Sunaryani, S.Sos	Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi	Anggota
6	Nunik Hendrayani, SH, MM	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Anggota
7	R Mohamad Waluyo Sejati, SH,MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Anggota
8	Wahyu Widiyatmoko, SE, M.M.	Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi	Anggota
9	Fajar Febrian, SH	Sub Koordinator Kelembagaan	Anggota
10	Bejo Iman Suroso, Se,MM	Sub Koordinator Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Anggota
11	Yuanita Rani Widasari, SSTP	Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	Anggota
12	Tri Astuti, SE	Sub Koordinator Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	Anggota

13	Rahmad Aji Maulana, S.STP	Sub Koordinator Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
14	Joestina Koesoemaningtyas, SE	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah	Anggota
15	Argya Cadipa Bomantara, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
16	Siti Kholisoh, S.Pd	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota
17	Ratna Safitri, S.A.P	Staf Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang	Anggota

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro  
Kota Semarang



MARGARITHA MITA DEWI SOPA